

ABSTRAK

Transformasi digital dalam sistem kesehatan nasional menjadikan Rekam Medis Elektronik (RME) sebagai instrumen utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia. Penerapan RME bertujuan meningkatkan mutu pelayanan, efisiensi administrasi, serta kesinambungan perawatan pasien. Namun, digitalisasi rekam medis juga menimbulkan tantangan baru, terutama terkait perlindungan data pribadi, keamanan informasi kesehatan, serta pemenuhan prinsip-prinsip bioetika dan kepastian hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik dari perspektif prinsip bioetika dan hukum kesehatan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan pustaka (*literature review*) dengan menganalisis berbagai sumber berupa peraturan perundang-undangan, buku teks, serta artikel ilmiah yang relevan dengan topik bioetika, hukum kesehatan, dan rekam medis elektronik.

Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan prinsip bioetika *autonomy*, *beneficence*, *non-maleficence*, dan *justice* dalam penyelenggaraan RME pada prinsipnya telah tercermin dalam tujuan dan fungsi RME, namun dalam praktik masih menghadapi kendala, khususnya dalam aspek perlindungan privasi data, keamanan sistem, transparansi pengelolaan data, serta kesenjangan infrastruktur digital. Dari sisi hukum, penyelenggaraan RME telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kerangka hukum tersebut memberikan kepastian hukum, perlindungan hak pasien, serta pengakuan terhadap RME sebagai dokumen dan alat bukti hukum yang sah.

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik sangat bergantung pada integrasi antara kemajuan teknologi, penerapan prinsip bioetika, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola, pengawasan, serta peningkatan pemahaman etika dan hukum di kalangan tenaga kesehatan guna mewujudkan penyelenggaraan RME yang etis, aman, dan berkeadilan.

Kata kunci: Rekam Medis Elektronik, Bioetika, Hukum Kesehatan, Perlindungan Data Pribadi.

ABSTRACT

Digital transformation in the national health system has positioned Electronic Medical Records (EMR) as a core instrument in healthcare service delivery in Indonesia. The implementation of EMR aims to improve the quality of healthcare services, administrative efficiency, and continuity of patient care. However, the digitalization of medical records also raises new challenges, particularly related to personal data protection, health information security, and the fulfillment of bioethical principles and legal certainty.

This study aims to review the implementation of Electronic Medical Records from the perspective of bioethics and health law in Indonesia. The research method employed is a literature review, analyzing relevant sources including laws and regulations, textbooks, and scientific articles related to bioethics, health law, and electronic medical records.

The results indicate that the application of bioethical principles *autonomy*, *beneficence*, *non-maleficence*, and *justice* in the implementation of EMR has been reflected in its objectives and functions. Nevertheless, practical challenges remain, particularly concerning data privacy protection, system security, transparency in data management, and disparities in digital infrastructure. From a legal perspective, the implementation of EMR is supported by a strong regulatory framework through the Regulation of the Minister of Health Number 24 of 2022 on Medical Records, reinforced by Law Number 17 of 2023 on Health, Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, and Law Number 1 of 2024 on Electronic Information and Transactions. This legal framework provides legal certainty, protection of patients' rights, and recognition of EMR as a valid medical document and legal evidence.

This study concludes that the successful implementation of Electronic Medical Records depends on the integration of technological advancement, the application of bioethical principles, and compliance with legal regulations. Therefore, strengthening governance, supervision, and the understanding of ethical and legal aspects among healthcare professionals is essential to ensure the ethical, secure, and equitable implementation of EMR.

Keywords: Electronic Medical Records, Bioethics, Health Law, Personal Data Protection.